# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan bahasan yang telah dibahas selama melakukan kerja praktek lapangan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung I adalah sebagai berikut;

1. Dengan adanya persyaratan lalu lintas giral dalam pembayaran gaji pegawai negeri sipil pusat yang dilaksanakan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung I sudah dapat dilaksnakan sudah dapat dilaksamakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Prosedur yang dilakukan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung sudah cukup baik, karena dengan adanya prosedur pembayaran gaji pegawai negeri sipil pusat secara giral tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Lalu lintas giral yang dilaksanakan diwilayah kerja KPKN Khususnya oleh Seksi Bank Tunggal mempunyai peranan yang sangat penting sekali karena dengan adanya penerbitan Giro Bilyet Bank terhadap Bank yang akan menjadi pembayarnya serta adanya potongan dari SPM yang berupa Carik 1, 2 tersebut maka pembayaran gaji para pegawai negeri sipil pusat oleh bank yang menjadi mitra kerjanya dapat berjalan dengan lancar.

## 5.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil pengamatan selama melaksanakan KPP di KPKN Bandung I, penulis ingin menyampaikan saran-saran yang bersifat membangun dan penulis berharap semoga dengan adanya saran tersebut dapat berguna dan bermanfaat. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Di dalam persyaratan lalu lintas giral, terutama dalam pembayaran gaji PNS penulis menyarankan agar paara karyawan dan karyawati, apabila gajinya dibayarkan diwilayah kerja KPKN baik itu karyawan lama maupun karyawan baru hendaknya menambah salah satu syarat yang dilampirkan disamnping daftar gaji yakni surat pernyataan dari bendaharawan gaji dan diketahui oleh kepala kantornya.
2. Perhitungan setiap gaji PNS yang terdapat dalam daftar gaji bulanan harus dicek dan dihitung kembali satu per satu itu pun bila terdapat perubahan dalam daftar gaji, misalnya terdaapat seorang pegawai yang meninggal dunia dan sebagainya. Hal ini untuk menghindari kesalahan hitung (kelebihan atau kekurangan) akan merugikan salah satu pihak. Kalau hitungannya lebih maka akan merugikan negara sedangkan apabila hitungannya kurang, maka akan merugikan PNS yang berhak. Jadi SPPG beserta daftar gaji sebelum dilakukan proses SPM oleh Seksi Perbendaharaan sebaiknya dicek dan diteliti dengan benar.
3. Agar lalu lintas dalam pembayaran gaji PNS tersebut dapat berperan labih baik lagi, penulis menyarankan agar diadakan suatu koordinasi, dimana koordinasi tersebut merupakan suatu proses penyatupaduan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya agar tercapai suatu tujuan yang saling berhubungan. Karena koordinasi yang menjadi tolak ukur adalah meningkatkan urusan lalu lintas giral.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
IGI